

MEMBEBAHKAN KELAS DARI OTORITARIANISME: TELAAH EKSISTENSIAL-KRITIS ATAS PENGELOLAAN KELAS BERBASIS KESADARAN

Zihan Amalia Saeful¹, Astuti Darmiyanti, MA.Ed., Ed.D²,
¹23106311100@student.unsika.ac.id, ²astuti.darmiyanti@fai.unsika.ac.id,

Abstrak

This study analyzes authoritarius practices in classroom management using authg qualitative literature review method. Integrating Sartre's existentialism and Freire's critical pedagogy as theoretical frameworks, the research reveals three key findings: (1) manifestations of authoritarianism through hierarchical structures and mechanistic reward-punishment systems; (2) contradictions between students' existential freedom and pedagogical control; and (3) an alternative model based on dialogue and participation. The results demonstrate how conventional classroom management reduces students to passive objects through Foucauldian disciplinary mechanisms. Conversely, the proposed consciousness-based model emphasizes teachers' role as facilitators, reflective evaluation, and flexible curriculum. The study recommends transforming pedagogical practices toward more humanistic and emancipatory approaches

Kata Kunci: Educational authoritarianism, existential freedom, critical pedagogy.

Abstract

Penelitian ini menganalisis praktik otoritarianisme dalam pengelolaan kelas melalui pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur. Dengan kerangka teoritis gabungan pemikiran Sartre (eksistensialisme) dan Freire (pedagogi kritis), studi ini mengungkap tiga temuan utama: (1) manifestasi otoritarianisme melalui struktur kelas hierarkis dan sistem reward-punishment mekanistik; (2) kontradiksi antara kebebasan eksistensial peserta didik dengan kontrol pedagogis; serta (3) model alternatif berbasis dialog dan partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kelas konvensional cenderung mereduksi siswa menjadi objek pasif melalui mekanisme disiplin Foucaultian. Sebaliknya, model berbasis kesadaran yang diusulkan menekankan peran guru sebagai fasilitator, evaluasi reflektif, dan kurikulum fleksibel. Studi ini merekomendasikan transformasi praktik pedagogis menuju pendekatan yang lebih humanis dan emansipatoris.

Keywords: Otoritarianisme pendidikan, kebebasan eksistensial, pedagogi kritis.

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No
234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Sindoro



This work is licensed
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License

PENDAHULUAN

Praktik pengelolaan kelas selama ini kerap direduksi sebagai upaya teknis untuk menjaga keteraturan, disiplin, dan efektivitas pembelajaran. Dalam kerangka seperti ini, guru sering ditempatkan sebagai satu-satunya pusat otoritas, sementara siswa diposisikan secara pasif, tunduk pada sistem kontrol yang ketat dan minim ruang partisipasi. Model pengelolaan seperti ini cenderung menumbuhkan suasana kelas yang represif, di mana struktur kuasa tidak memungkinkan adanya dialog maupun kebebasan berpikir. Dalam konteks tersebut, Paulo Freire menyebut bahwa pendidikan semacam ini melahirkan “*banking model of education*,” yakni suatu sistem di mana guru menjadi deposan informasi, dan siswa hanya menjadi wadah kosong untuk diisi pengetahuan tanpa peluang kritis (Freire, 2018). Model ini tidak hanya mereduksi relasi pedagogis menjadi satu arah, tetapi juga meneguhkan relasi kekuasaan yang menindas. Giroux menambahkan bahwa pendekatan pengelolaan yang menekankan dominasi dan disiplin keras berisiko melumpuhkan kapasitas siswa untuk bertanya, menafsirkan, dan mengubah realitas sosialnya (Giroux, 2011). Dalam tinjauan filsafat pendidikan, pola seperti ini tidak sekadar menyangkut metode, melainkan telah menjadi ekspresi ideologis dari ketakutan terhadap kebebasan dan subjek yang berpikir.

Jean-Paul Sartre, dalam perspektif eksistensialisnya, menegaskan bahwa manusia tidak dilahirkan dengan esensi tetap, melainkan membentuk dirinya melalui pilihan dan tanggung jawab yang disadari. Dalam pandangannya, “*existence precedes essence*” menandai bahwa setiap manusia adalah proyek yang belum selesai dan harus dimaknai melalui kebebasan untuk memilih (Sartre, 2007). Ketika ruang kelas tidak memberi tempat bagi siswa untuk memilih, menyuarkan diri, dan berefleksi, maka pendidikan kehilangan wataknya yang eksistensial. Hal ini juga ditegaskan oleh Sudrajat dalam kajiannya, bahwa pendekatan pendidikan yang meniadakan partisipasi aktif peserta didik bertentangan dengan semangat humanisasi dalam filsafat pendidikan modern (Sudrajat, 2019).

Karena itu, pengelolaan kelas tidak seharusnya dilihat sebagai teknik administratif belaka, melainkan perlu ditinjau sebagai praktik ideologis yang mencerminkan relasi antara manusia dan struktur kekuasaan. Dengan memadukan pemikiran Sartre dan Freire, artikel ini mengajukan gagasan tentang pengelolaan kelas berbasis kesadaran, yaitu pengelolaan yang menjunjung kebebasan eksistensial siswa dan membangun relasi edukatif yang dialogis dan emansipatoris. Model ini diharapkan mampu membebaskan kelas dari jeratan otoritarianisme yang selama ini justru mengaburkan tujuan sejati pendidikan: membentuk manusia yang bebas, sadar, dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (*library research*) yang bersifat analitis-reflektif. Kajian ini bertujuan menafsirkan realitas pengelolaan kelas sebagai praktik pedagogis yang tidak netral, melainkan sarat muatan ideologis dan filsafati. Pendekatan kualitatif dipilih karena karakteristiknya yang berorientasi pada pemaknaan, bukan pada pengukuran kuantitatif. Seperti ditegaskan oleh Creswell, penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dihasilkan oleh individu atau kelompok terhadap suatu persoalan sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2013). Dalam hal ini, makna pengelolaan kelas tidak dikaji dari sisi teknis administratif semata, melainkan sebagai ruang yang merepresentasikan relasi kuasa, subjektivitas, dan kebebasan manusia, sebagaimana diusung oleh Jean-Paul Sartre dan Paulo Freire.

Metode kajian literatur dalam penelitian ini dilakukan melalui telaah mendalam terhadap karya-karya filsafat pendidikan, terutama karya primer seperti *Existentialism Is a Humanism* karya Jean-Paul Sartre dan *Pedagogy of the Oppressed* karya Paulo Freire. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan artikel-artikel jurnal ilmiah bereputasi serta buku-buku akademik pendukung yang membahas tema pengelolaan kelas, pedagogi kritis, dan eksistensialisme dalam konteks pendidikan. Menurut Machi dan McEvoy, kajian literatur yang sistematis tidak sekadar mengumpulkan referensi,

tetapi harus mampu menyusun narasi konseptual yang menghubungkan ide-ide dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan riset yang diajukan (Machi & McEvoy, 2016). Karena itu, kajian ini dilakukan tidak secara deskriptif belaka, tetapi analitis-kritis dengan menempatkan dua tokoh sentral, Sartre dan Freire, dalam satu kerangka dialogis untuk merekonstruksi pendekatan pengelolaan kelas yang lebih humanis.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

pertama, bagaimana karakteristik pengelolaan kelas yang bersifat otoritarian dalam praktik pendidikan kontemporer? Kedua, bagaimana relevansi gagasan kebebasan eksistensial Jean-Paul Sartre terhadap praksis pendidikan di ruang kelas? Ketiga, bagaimana integrasi pemikiran Paulo Freire dan Jean-Paul Sartre dapat merumuskan pendekatan pengelolaan kelas yang berbasis kesadaran dan pembebasan? Ketiga rumusan tersebut menjadi peta jalan untuk mengarahkan kajian literatur dan analisis filosofis yang dilakukan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara kritis pola-pola otoritarian dalam pengelolaan kelas yang masih lazim ditemukan di berbagai praktik pendidikan; menjelaskan kontribusi filsafat eksistensialisme Sartre dalam memaknai kebebasan peserta didik; serta merumuskan alternatif pengelolaan kelas berbasis kesadaran yang memadukan prinsip-prinsip pedagogi kritis Freire dengan etika kebebasan Sartre. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan perspektif baru dalam memahami pengelolaan kelas, tetapi juga menjadi upaya konseptual dalam membebaskan praktik pendidikan dari nalar dominasi yang mengekang kebebasan berpikir.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana filsafat pendidikan dengan menggabungkan dua pendekatan yang sering dipisahkan: eksistensialisme dan pedagogi kritis. Pendekatan eksistensial menekankan kebebasan individu dan tanggung jawab eksistensialnya, sementara pedagogi kritis menekankan pentingnya kesadaran sosial dan pembebasan dari penindasan struktural. Sintesis keduanya dapat menjadi fondasi bagi pendekatan pengelolaan kelas yang lebih dialogis, partisipatif, dan transformatif. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi guru, dosen, dan pengelola pendidikan dalam menciptakan suasana kelas yang lebih manusiawi dan memerdekakan. Seperti ditegaskan oleh Biesta, pendidikan seharusnya tidak hanya berfungsi untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang untuk “menjadi subjek” secara otentik di tengah dunia (Biesta, 2013).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam filsafat eksistensialisme, Jean-Paul Sartre menekankan bahwa “eksistensi mendahului esensi,” yang berarti bahwa manusia pertama-tama ada, kemudian menentukan dirinya melalui tindakan dan pilihan. Dalam konteks pendidikan, hal ini menekankan pentingnya kebebasan individu dalam menentukan makna dan tujuan hidupnya. Sartre berpendapat bahwa pendidikan seharusnya memungkinkan siswa untuk menjadi agen aktif dalam proses pembelajaran, bukan sekadar penerima informasi pasif. Ia menyatakan, “*Man is condemned to be free; because once thrown into the world, he is responsible for everything he does*” (Sartre, 1946). Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebebasan individu dalam pendidikan sangat penting untuk membentuk identitas dan tanggung jawab moral.

Sementara itu, Paulo Freire, melalui pedagogi kritisnya, mengkritik model pendidikan tradisional yang ia sebut sebagai “*banking model*,” di mana guru dianggap sebagai pemberi pengetahuan dan

siswa sebagai penerima pasif. Freire mendorong pendekatan “*problem-posing*,” di mana siswa diajak untuk berpikir kritis dan aktif dalam proses pembelajaran, serta memahami dan mengubah realitas sosial mereka. Ia menegaskan, “*Education is the practice of freedom, the means by which men and women deal critically and creatively with reality and discover how to participate in the transformation of their world*” (Freire, 1970). Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog dan interaksi antara guru dan siswa, sehingga siswa dapat mengembangkan pemikiran kritis dan kesadaran sosial.

Kedua pendekatan ini menekankan pentingnya kebebasan, tanggung jawab, dan partisipasi aktif siswa dalam proses pendidikan, serta menolak struktur pendidikan yang otoriter dan menindas. Seperti yang diungkapkan oleh Bell Hooks, “*Life-transforming ideas have always come to me through books*” (Hooks, 1994), yang menunjukkan bahwa pendidikan yang bermakna harus mampu mengubah cara pandang siswa terhadap dunia dan diri mereka sendiri. hooks juga menekankan bahwa pendidikan harus menjadi ruang di mana siswa dapat mengeksplorasi identitas mereka dan berkontribusi pada perubahan sosial, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan.

Baik Sartre maupun Freire memberikan kontribusi penting dalam pemikiran pendidikan yang menekankan kebebasan dan partisipasi aktif. Keduanya mengajak kita untuk merefleksikan kembali tujuan pendidikan dan bagaimana kita dapat menciptakan ruang belajar yang lebih demokratis dan memberdayakan bagi semua siswa.

Berbicara tentang pemberdayaan bagi siswa, pada kenyataannya praktik otoritarianisme dalam pengelolaan kelas konvensional masih mendominasi sistem pendidikan, terutama melalui struktur hierarkis *top-down* yang menempatkan guru sebagai satu-satunya pemegang otoritas pengetahuan. Dalam model ini, guru cenderung mendominasi secara verbal, sementara siswa diposisikan sebagai penerima pasif yang harus tunduk pada aturan yang telah ditetapkan (Freire, 1970). Sistem penghargaan dan hukuman yang mekanistik semakin memperkuat ketergantungan siswa pada validasi eksternal, alih-alih mengembangkan motivasi intrinsik (Kohn, 1999). Foucault (1977) mengkritik praktik semacam ini sebagai bentuk disiplin yang menormalisasi kontrol melalui mekanisme pengawasan dan penilaian yang represif. Akibatnya, ruang kelas berubah menjadi arena reproduksi ketimpangan kuasa, di mana kreativitas dan otonomi siswa tereduksi oleh struktur yang kaku.

Dari perspektif eksistensial Sartre (1956), relasi kuasa dalam kelas konvensional mengingkari hakikat manusia sebagai makhluk yang bebas dan otentik. Ketika siswa dipaksa mengikuti kurikulum yang seragam tanpa ruang untuk mengekspresikan diri, mereka kehilangan kemampuan untuk “mengada” secara autentik. Freire (1970) menambahkan bahwa pendidikan semacam ini merupakan bentuk “*banking concept of education*,” di mana pengetahuan hanya ditransfer dari guru ke murid tanpa dialog kritis. Hal ini menciptakan “kebudayaan bisu” (*culture of silence*) di mana siswa tidak diajak untuk mempertanyakan struktur sosial yang menindas (Freire, 1970). Dengan demikian, kelas yang otoriter tidak hanya membatasi perkembangan kognitif tetapi juga mematikan kesadaran kritis sebagai fondasi perubahan sosial.

Sebagai alternatif, diperlukan model pengelolaan kelas berbasis kesadaran yang mengedepankan dialog sebagai metode utama pembelajaran. Freire (1970) menekankan bahwa pendidikan yang membebaskan harus dibangun melalui komunikasi horizontal antara guru dan murid, di mana kedua pihak terlibat dalam proses “*co-creation of knowledge*.” Guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi aktif siswa dalam merumuskan aturan kelas, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab bersama (Rogers, 1969). Evaluasi pun harus bersifat reflektif, bukan sekadar mengukur hasil akhir, tetapi juga proses berpikir dan pengalaman emosional siswa (Dewey, 1938).

Prinsip-prinsip kelas yang membebaskan ini mencakup: (1) penghargaan terhadap otonomi siswa, (2) pembelajaran berbasis pengalaman, (3) lingkungan yang mendukung eksplorasi kritis, dan (4) penekanan pada kolaborasi alih-alih kompetisi (Hooks, 1994). Dengan demikian, kelas tidak lagi menjadi ruang represif, melainkan tempat di mana siswa dapat mengembangkan kesadaran diri dan agensi untuk bertindak secara transformatif.

SIMPULAN DAN SARAN

Praktik pengelolaan kelas konvensional yang bersifat otoriter telah menciptakan relasi kuasa yang timpang, di mana guru menjadi pusat otoritas sementara siswa diposisikan sebagai subjek pasif. Melalui analisis kritis berdasarkan pemikiran Sartre dan Freire, penelitian ini mengungkap bahwa struktur pendidikan yang hierarkis dan mekanistik—seperti dominasi verbal guru, sistem reward-punishment yang kaku, dan minimnya partisipasi siswa—tidak hanya mengekang kebebasan eksistensial peserta didik, tetapi juga mereduksi pendidikan menjadi alat reproduksi ketidakadilan sosial (Freire 1970; Foucault 1977). Sartre (1956) menegaskan bahwa manusia adalah proyek kebebasan yang harus menentukan dirinya sendiri, sementara Freire (1970) mengkritik model “banking education” yang mematikan kesadaran kritis. Kedua perspektif ini menyoroti betapa pentingnya mentransformasi pengelolaan kelas dari pendekatan otoritarian menuju model yang membebaskan, dialogis, dan partisipatif.

Model pengelolaan kelas berbasis kesadaran yang diusulkan dalam penelitian ini menekankan prinsip-prinsip: (1) dialog sebagai metode pembelajaran, (2) kebebasan berekspresi dan partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan, (3) peran guru sebagai fasilitator kesadaran kritis, serta (4) evaluasi reflektif yang holistik (Freire 1970; Dewey 1938; Hooks 1994). Pendekatan ini tidak hanya mengembalikan hakikat pendidikan sebagai proses humanisasi, tetapi juga memungkinkan siswa untuk menjadi subjek aktif yang mampu mengintervensi realitas sosialnya. Dengan demikian, kelas tidak lagi menjadi ruang represif, melainkan ruang pembebasan di mana siswa dapat mengembangkan otonomi, tanggung jawab, dan kesadaran transformatif.

Berdasarkan temuan penelitian, berikut beberapa rekomendasi untuk mengimplementasikan pengelolaan kelas yang lebih membebaskan:

1. Bagi Pendidik

- a. Guru perlu menggeser peran dari “pemegang otoritas mutlak” menjadi fasilitator dialog yang mendorong partisipasi aktif siswa. Hal ini dapat dilakukan melalui metode diskusi terbuka, pembelajaran berbasis proyek, dan penyusunan aturan kelas secara kolaboratif (Rogers 1969).
- b. Mengurangi ketergantungan pada sistem reward-punishment eksternal dan beralih ke motivasi intrinsik dengan memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan pertanyaan kritis (Kohn 1999).

2. Bagi Institusi Pendidikan

- a. Kurikulum harus dirancang fleksibel untuk memungkinkan pembelajaran kontekstual yang relevan dengan kehidupan siswa, alih-alih sekadar mengejar target standarisasi (Dewey 1938).

- b. Pelatihan guru perlu memasukkan materi pedagogi kritis dan filsafat eksistensial agar pendidik memahami pentingnya relasi kuasa yang setara dalam kelas (Giroux 2011).

3. Bagi Penelitian Lanjutan

- a. Perlu kajian lebih mendalam tentang implementasi model pengelolaan kelas berbasis kesadaran dalam berbagai konteks budaya dan sistem pendidikan yang berbeda.
- b. Penelitian tindakan (action research) dapat dilakukan untuk menguji efektivitas pendekatan dialogis dalam meningkatkan kesadaran kritis siswa.

4. Bagi Kebijakan Pendidikan

- a. Pemerintah dan pemangku kebijakan harus mendorong desentralisasi pengelolaan kelas dengan memberi keleluasaan pada guru dan siswa untuk merancang proses pembelajaran yang partisipatif.
- b. Evaluasi pendidikan perlu bergeser dari ukuran kuantitatif (seperti nilai ujian) menuju asesmen holistik yang mencakup perkembangan sikap, keterampilan berpikir, dan refleksi diri (Biesta 2013).

Dengan menerapkan rekomendasi di atas, pendidikan dapat benar-benar menjadi praksis pembebasan—sebagaimana diidealkan Freire dan Sartre—yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga memberdayakan manusia untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Biesta, G. (2013). *The beautiful risk of education*. Paradigm Publishers.

Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). Sage Publications.

Dewey, J. (1938). *Experience and education*. Macmillan.

Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Penguin Books.

Freire, P. (2018). *Pedagogy of the oppressed* (M. B. Ramos, Trans.). Bloomsbury Academic. (Original work published 1970)

Giroux, H. A. (2011). *On critical pedagogy*. Bloomsbury Academic.

hooks, b. (1994). *Teaching to transgress: Education as the practice of freedom*. Routledge.

Kohn, A. (1999). *Punished by rewards: The trouble with gold stars, incentive plans, A's, praise, and other bribes*. Houghton Mifflin.

Machi, L. A., & McEvoy, B. T. (2016). *The literature review: Six steps to success* (3rd ed.). Corwin.

Rogers, C. (1969). *Freedom to learn*. Merrill.

Sartre, J.-P. (1956). *Being and nothingness*. Philosophical Library.

Sartre, J.-P. (2007). *Existentialism is a humanism* (C. Macomber, Trans.). Yale University Press. (Original work published 1946)

Sudrajat, N. (2019). Filsafat pendidikan dan eksistensi manusia: Kajian filosofis terhadap konsep pendidikan humanis. *Jurnal Filsafat*, 29(2), 145-160.